



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Jujur • Bertanggung Jawab • Berkompetensi
Harmonis • Loyal • Dapat Dipercaya • Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026
(TRIWULAN III)**

DISUSUN OLEH :

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 Triwulan III (sampai dengan bulan September 2026) dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh kegiatan yang didanai melalui APBD harus memenuhi aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pengendalian kegiatan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target secara tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 (bulan September 2026) telah disajikan dalam laporan ini sebagai bahan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan APBD yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada Triwulan IV agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

Sukoharjo, Oktober 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo



Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina
NIP 197603102011011006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	2
BAB II STRUKTUR APBD	3
BAB III REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD	5
A. Pagu Anggaran/Belanja.....	5
B. Target (Angkas).....	6
C. Realisasi Belanja.....	6
D. Perbandingan Realisasi Belanja Dengan Tahun Sebelumnya	7
BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	9
BAB V KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	11
B. Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Target Angkas OPD.....	13
C. Perbandingan Kinerja OPD Dengan Tahun Sebelumnya	14
BAB VI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH	17
A. Rincian Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi	17
B. Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Keuangan APBD Provinsi.....	17
BAB VII PROYEK STRATEGIS	19
BAB VIII INFRASTRUKTUR	22
BAB IX PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Rekomendasi.....	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	: Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan September 2026 Terhadap Pagu
Lampiran II	: Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan September 2026 Terhadap Target Angkas
Lampiran III	: Perbandingan Realisasi APBD s.d Bulan September 2026 Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun 2026
Lampiran IV	: Perkembangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan September 2026
Lampiran V	: Progres Pelaksanaan Proyek Strategis s.d Triwulan II 2026 s.d Bulan September 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja APBD Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Triwulan III Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Laporan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, capaian fisik kegiatan, serta hasil analisis kinerja perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan III. Analisis dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi fisik maupun keuangan, serta identifikasi kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan dan penyelesaian program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan strategi percepatan pelaksanaan APBD pada Triwulan IV.

Evaluasi Triwulan III memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyelesaikan program dan kegiatan menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, diperlukan peningkatan pengendalian terhadap kegiatan yang belum mencapai target, mengidentifikasi hambatan administratif maupun teknis, serta segera menindaklanjuti permasalahan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan yang belum sesuai dengan target, kegiatan yang belum dimulai atau masih dalam proses pelaksanaan, serta kegiatan yang berpotensi tidak selesai sampai dengan akhir tahun. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Penyajian data yang akurat dan analisis yang objektif diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat, memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD, serta mendorong percepatan penyelesaian program dan kegiatan guna mencapai target kinerja secara optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

B. DASAR HUKUM

Mekanisme anggaran dan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II STRUKTUR APBD

Struktur belanja APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.753.782.401	584.753.782.401	-
04.01.01	Pajak Daerah	367.140.000.000	367.140.000.000	-
04.01.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694	124.796.536.694	-
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	43.581.050.000	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707	49.236.195.707	-
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.296.833.780.392	1.296.833.780.392	-
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	1.191.287.339.620	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.546.440.772	113.377.440.772	7.831.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.881.587.562.793	1.889.418.562.793	7.831.000.000
5	BELANJA DAERAH			
05.01	BELANJA OPERASI	1.588.775.936.121	1.596.324.556.131	7.548.620.010
05.01.01	Belanja Pegawai	977.510.074.743	977.505.675.467	(4.399.276)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	562.108.635.305	554.943.204.591	(7.165.430.714)
05.01.04	Belanja Subsidi	756.864.073	756.864.073	-
05.01.05	Belanja Hibah	40.778.062.000	55.476.512.000	14.698.450.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.622.300.000	7.642.300.000	20.000.000
05.02	BELANJA MODAL	126.557.391.980	127.276.348.770	718.956.790
05.02.01	Belanja Modal Tanah	4.000.000.000	3.702.209.000	(297.791.000)
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.852.579.027	21.975.020.317	(3.877.558.710)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.031.321.500	45.220.781.500	189.460.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.040.241.000	49.677.723.500	4.637.482.500
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.633.250.453	6.700.614.453	67.364.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.421.895.692	5.064.318.892	(1.357.576.800)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.421.895.692	5.064.318.892	(1.357.576.800)
05.04	BELANJA TRANSFER	286.710.747.000	287.631.747.000	921.000.000
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000	27.206.562.000	-
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.504.185.000	260.425.185.000	921.000.000
	Jumlah Belanja	2.008.465.970.793	2.016.296.970.793	7.831.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	(126.878.408.000)	(126.878.408.000)	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.878.408.000	133.878.408.000	-
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.878.408.000	133.878.408.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.878.408.000	133.878.408.000	-
				-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	7.000.000.000	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	126.878.408.000	126.878.408.000	-
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB III

REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD

Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September tahun 2026 berdasarkan laporan dari masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

A. PAGU ANGGARAN BELANJA

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan pagu Anggaran Belanja yang dialokasikan ke dalam beberapa jenis belanja. Rincian pagu belanja disusun berdasarkan jenis belanja yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer.

Adapun struktur dan besaran pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

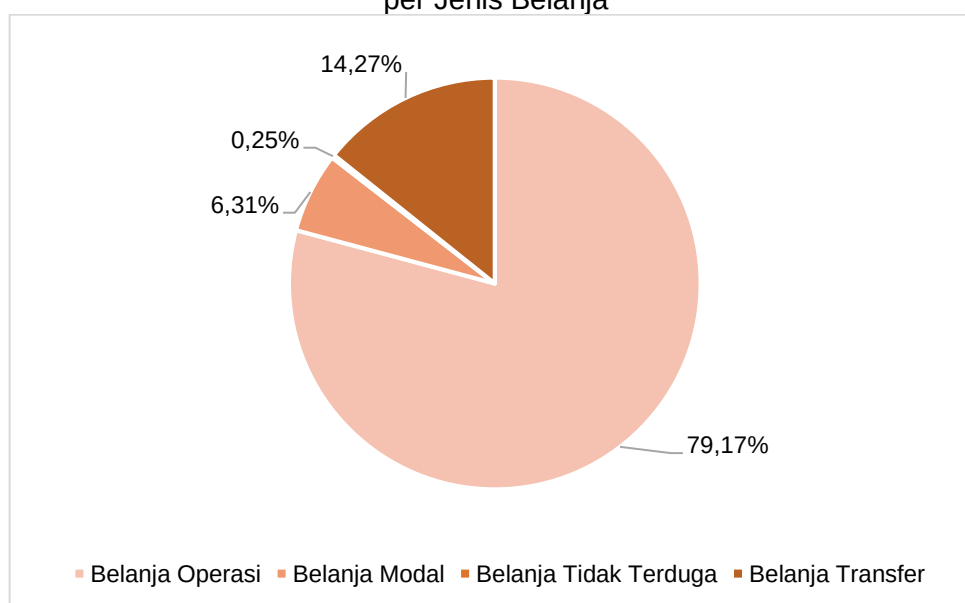
Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	% thd Total Pagu
Belanja Operasi	Rp. 1.596.324.556.131	79,17%
Belanja Modal	Rp. 127.276.348.770	6,31%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.064.318.892	0,25%
Belanja Transfer	Rp. 287.631.747.000	14,27%
Total Anggaran	Rp. 2.016.296.970.793	100%

Sumber : Data diolah

Grafik 3.1

Persentase Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja



Sumber : Data diolah

B. TARGET (ANGKAS)

Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan target capaian keuangan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi penyerapan anggaran pada setiap jenis belanja. Target capaian keuangan sampai dengan bulan September 2026 berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Capaian Keuangan Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d September 2026

Jenis Belanja	Target	% thd Pagu
Belanja Operasi	Rp. 1.552.189.090.403	97,24%
Belanja Modal	Rp. 112.543.334.670	88,42%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.064.318.892	100%
Belanja Transfer	Rp. 287.000.747.000	99,78%
Total Target	Rp. 1.956.797.490.965	97,05%

Sumber : Data diolah

C. REALISASI BELANJA

Realisasi belanja merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelaksanaan APBD sampai dengan periode pelaporan (dalam hal ini Triwulan III). Berikut disajikan tingkat penyerapan anggaran pada masing-masing jenis belanja sehingga dapat diidentifikasi komponen belanja yang masih perlu dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian realisasi belanja Kabupaten Sukoharjo sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut.

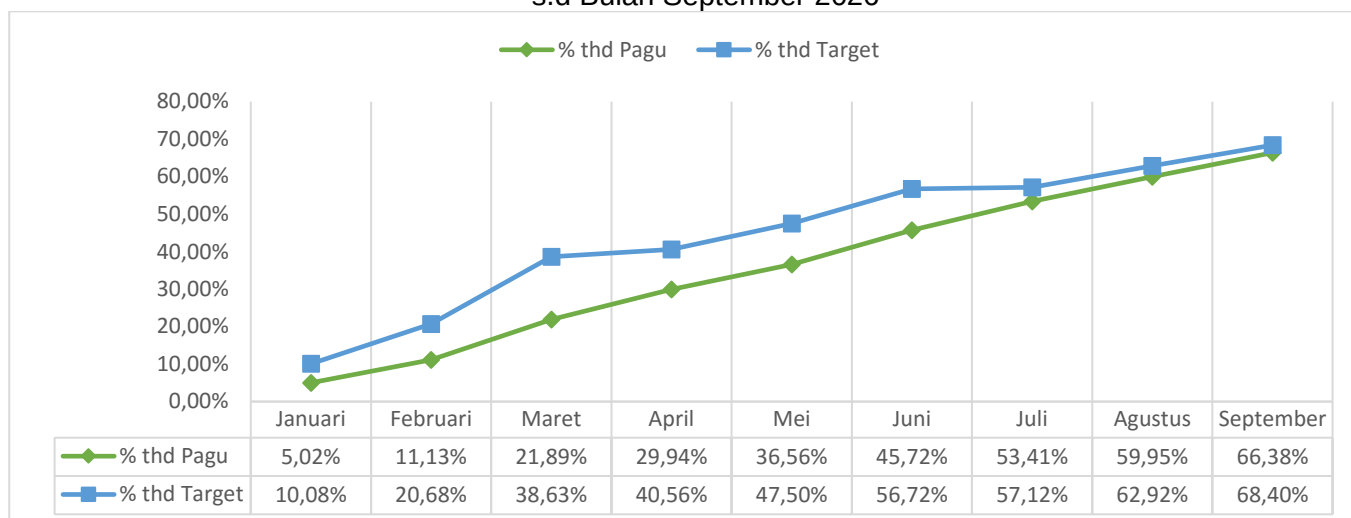
Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d September 2026

Jenis Belanja	Realisasi Belanja	% thd Pagu	% thd Target
Belanja Operasi	Rp. 1.109.799.437.132	69,52%	71,50%
Belanja Modal	Rp. 51.192.547.224	40,22%	45,49%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 71.482.800	1,41%	1,41%
Belanja Transfer	Rp. 177.409.757.680	61,68%	61,82%
Total Realisasi	Rp. 1.338.473.224.836	66,38%	68,40%

Sumber : Data diolah

Untuk menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran daerah selama tahun berjalan, berikut disajikan grafik tren realisasi belanja APBD Tahun 2026 setiap bulannya. Grafik ini menunjukkan pola pertumbuhan realisasi belanja dari bulan Januari hingga September tahun 2026.

Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Sukoharjo
s.d Bulan September 2026



Sumber : Data diolah

D. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TAHUN BERJALAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

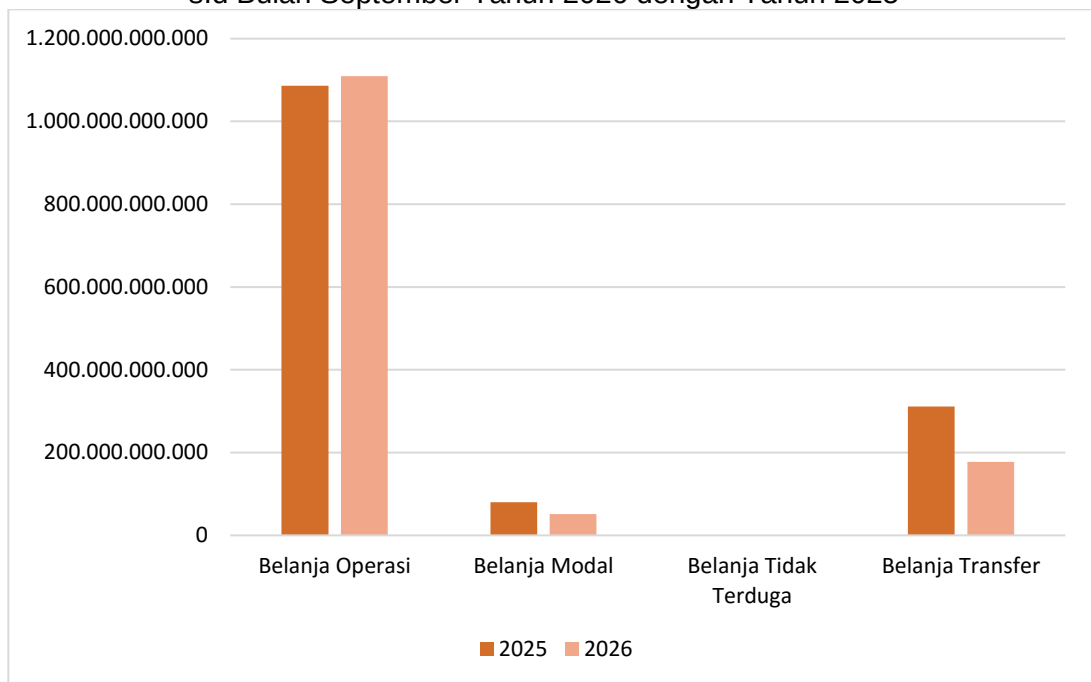
Sebagai salah satu dasar evaluasi kinerja pengelolaan anggaran, berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan realisasi belanja sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2026 dengan realisasi belanja sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2025. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat penyerapan anggaran serta perubahan pola belanja dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Belanja
s.d Bulan September Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Jenis Belanja	Tahun 2025		Tahun 2026		(±) %
	Rp.	%	Rp.	%	
Belanja Operasi	1.085.881.323.569	63,46%	1.109.799.437.132	69,52%	6,06%
Belanja Modal	80.296.879.572	40,63%	51.192.547.224	40,22%	-0,41%
Belanja Tidak Terduga	147.891.323	14,03%	71.482.800	1,41%	-12,62%
Belanja Transfer	311.183.277.640	77,31%	177.409.757.680	61,68%	-15,63%
Total Realisasi	1.477.509.372.104	63,90%	1.338.473.224.836	66,38%	2,48%

Sumber : Data diolah

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Belanja
s.d Bulan September Tahun 2026 dengan Tahun 2025



Sumber : Data diolah

BAB IV

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 30 September 2026 adalah sebesar Rp. 436.963.752.503,00 (74,72%) dari total Anggaran sebesar Rp. 584.753.782.401,00. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 September 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 s.d 30 September 2026

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.889.418.562.793	1.315.142.073.975	69,60
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.753.782.401	436.963.752.503	74,72
4.1.01	Pajak Daerah	367.140.000.000	296.011.115.932	80,62
4.1.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694	76.054.536.001	60,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	28.184.144.233	64,67
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707	36.713.956.337	74,56
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	584.753.782.401	436.963.752.503	74,72
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.304.664.780.392	876.178.321.472	67,15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	805.108.338.199	67,58
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.344.546.000	19.241.828.800	99,46
4.2.01.07.001	DBH Pajak	18.921.166.000	18.884.366.000	99,8
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	423.380.000	357.462.800	84,43
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	760.481.391.000	569.511.035.000	74,88
4.2.01.08.001	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	757.081.391.000	567.811.035.000	74,99
4.2.01.08.002	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.400.000.000	1.700.000.000	50,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	274.656.994.620	190.119.710.199	69,22
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	274.656.994.620	190.119.710.199	69,22
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.054.482.931.620	778.872.573.999	73,86
4.2.01.05	Dana Desa	136.804.408.000	26.235.764.200	19,17
4.2.01.05.001	Dana Desa	136.804.408.000	26.235.764.200	19,17

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	136.804.408.000	26.235.764.200	19,17
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.377.440.772	71.069.983.273	62,68
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	105.546.440.772	70.148.983.273	66,46
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	105.546.440.772	70.148.983.273	66,46
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	113.377.440.772	71.069.983.273	62,68
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.304.664.780.392	876.178.321.472	67,15

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB V

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN PAGU

Data perbandingan realisasi APBD Tahun 2026 sampai dengan bulan September 2026 terhadap pagu memberikan gambaran mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing OPD terhadap pagu anggaran yang telah dialokasikan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Kab. Sukoharjo
s.d September 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	101.800.000.000	89.895.897.850	88,31
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.427.177.710	469.071.393.606	78,25
3	Dinas Sosial	17.889.976.940	13.686.945.432	76,51
4	Dinas Perhubungan	46.821.199.170	34.341.684.697	73,35
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.261.646.000	7.904.650.514	70,19
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.846.287.400	15.691.598.957	68,68
7	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299	21.000.302.711	67,43
8	Kecamatan Gatak	3.500.455.274	2.349.851.158	67,13
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.394.619.645	10.899.879.253	66,48
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.195.936.000	2.120.951.672	66,36
11	Dinas Kesehatan	327.432.287.517	212.258.456.527	64,83
12	Satuan Polisi Pamong Praja	14.980.493.900	9.675.556.052	64,59
13	Sekretariat Daerah	57.584.201.300	36.816.113.901	63,93
14	Sekretariat DPRD	78.361.380.309	49.946.420.509	63,74
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.703.325.920	4.831.507.260	62,72
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.424.141	4.885.930.436	61,85
17	Kecamatan Grogol	3.134.666.000	1.864.087.449	59,47
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.364.326.185	197.193.316.022	58,98
19	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808	2.697.531.284	57,81
20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.117.147.900	6.943.957.563	57,31
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.489.134.502	4.284.594.607	57,21
22	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000	1.814.542.509	55,94
23	Kecamatan Nguter	3.068.998.000	1.712.608.155	55,80
24	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232	1.806.747.683	55,70
25	Inspektorat Daerah	10.213.972.000	5.688.479.373	55,69

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.719.057.000	8.708.707.114	55,40
27	Kecamatan Baki	3.348.790.000	1.848.556.265	55,20
28	Dinas Pangan	5.624.270.280	3.076.723.862	54,70
29	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.267.543.235	11.513.895.913	54,14
30	Kecamatan Weru	3.011.279.000	1.578.394.089	52,42
31	Kecamatan Bulu	2.985.390.755	1.561.418.128	52,30
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.628.431.730	5.028.836.663	52,23
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.210.127.124	17.299.690.062	52,09
34	Kecamatan Kartasura	6.848.267.634	3.558.778.449	51,97
35	Kecamatan Tawangsari	3.075.321.300	1.583.721.385	51,50
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.819.057.202	5.404.893.607	49,96
37	Kecamatan Sukoharjo	27.535.402.100	13.568.962.152	49,28
38	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000	8.243.157.478	48,73
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.714.083.000	3.751.134.019	48,63
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.621.834.281	42.363.350.470	35,71
	JUMLAH	2.016.296.970.793	1.338.473.224.836	66,38

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut, kemudian dianalisis dan diperoleh 3 OPD dengan capaian realisasi APBD tertinggi dibandingkan Pagu Anggaran, yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 88,31%
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 78,25%
3. Dinas Sosial sebesar 76,51%

Adapun 3 OPD dengan capaian realisasi APBD terendah, yaitu :

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 48,73%.
Realisasi APBD DISPORAPAR sebesar Rp8,24 miliar dari total pagu Rp16,91 miliar. Capaian masih rendah karena penyerapan belanja barang/jasa (seperti beasiswa Rp2,5 miliar dan rehabilitasi Gelora Jombor Rp2,8 miliar yang baru dibayar uang mukanya) menumpuk di triwulan IV, ditambah sisa belanja pegawai yang belum terealisasi sebesar Rp1,95 miliar.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 48,63%.
Realisasi APBD DPMPTSP yang baru mencapai 48,63% (dari total anggaran Rp7.714.083.000) dipengaruhi oleh dominasi anggaran belanja gaji hingga 73,6% dari total belanja (Rp5.681.000.000) serta tidak

terrealisasinya anggaran kenaikan TPP sebesar Rp2,362 miliar pada APBD penetapan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar 35,71%.

Realisasi APBD DPUPR sebesar Rp42,36 miliar dari total pagu Rp118,62 miliar. Capaian masih rendah karena sebagian besar kegiatan fisik belum berjalan dan baru berada pada tahap proses pengadaan (seperti penyusunan DED serta proses di UKPBJ).

Rekapitulasi perbandingan realisasi APBD terhadap pagu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan September 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari laporan ini.

B. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN TARGET ANGKAS

Untuk menilai pencapaian kinerja OPD, dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan realisasi keuangan dengan target angkas yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun perbandingan antara realisasi keuangan dengan target angkas hingga periode bulan September 2026 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target Angkas OPD Kab. Sukoharjo
s.d. September 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	95.754.623.000	89.895.897.850	93,88%
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	595.837.348.470	469.071.393.606	78,72%
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.125.903.745	10.899.879.253	77,16%
4	Dinas Sosial	17.841.379.690	13.686.945.432	76,71%
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.632.112.400	15.691.598.957	76,05%
6	Dinas Perhubungan	46.821.199.170	34.341.684.697	73,35%
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.974.441.500	7.904.650.514	72,03%
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.056.220.000	4.284.594.607	70,75%
9	Kecamatan Bulu	2.239.043.067	1.561.418.128	69,74%
10	Kecamatan Gatak	3.402.455.474	2.349.851.158	69,06%
11	Satuan Polisi Pamong Praja	14.025.223.000	9.675.556.052	68,99%
12	Dinas Kesehatan	311.471.646.422	212.258.456.527	68,15%
13	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299	21.000.302.711	67,43%
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.158.107.000	2.120.951.672	67,16%
15	Sekretariat DPRD	75.371.033.703	49.946.420.509	66,27%
16	Sekretariat Daerah	56.873.255.300	36.816.113.901	64,73%
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.499.504.920	4.831.507.260	64,42%
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.729.117.341	4.885.930.436	63,21%
19	Inspektorat Daerah	9.059.788.000	5.688.479.373	62,79%
20	Kecamatan Grogol	3.064.259.000	1.864.087.449	60,83%

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.891.132.202	5.404.893.607	60,79%
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	19.402.206.185	11.513.895.913	59,34%
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.727.451.400	6.943.957.563	59,21%
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	333.948.691.185	197.193.316.022	59,05%
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.988.431.900	8.708.707.114	58,10%
26	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808	2.697.531.284	57,81%
27	Kecamatan Baki	3.280.508.000	1.848.556.265	56,35%
28	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000	1.814.542.509	55,94%
29	Kecamatan Nguter	3.067.998.000	1.712.608.155	55,82%
30	Dinas Pangan	5.519.641.780	3.076.723.862	55,74%
31	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232	1.806.747.683	55,70%
32	Kecamatan Kartasura	6.636.410.634	3.558.778.449	53,63%
33	Kecamatan Weru	2.965.859.000	1.578.394.089	53,22%
34	Kecamatan Tawangsari	3.010.037.300	1.583.721.385	52,61%
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.584.468.730	5.028.836.663	52,47%
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.133.113.124	17.299.690.062	52,21%
37	Kecamatan Sukoharjo	27.261.202.600	13.568.962.152	49,77%
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.673.354.000	3.751.134.019	48,89%
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000	8.243.157.478	48,73%
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.557.333.384	42.363.350.470	40,52%
	JUMLAH	1.956.797.490.965	1.338.473.224.836	68,40%

Sumber : Data diolah

Rekapitulasi perbandingan realisasi APBD terhadap target angkas masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan September 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisah dari laporan ini.

C. PERBANDINGAN KINERJA OPD DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, disajikan perbandingan kinerja OPD Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025, masing-masing sampai dengan bulan September. Penyajian perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai perkembangan efektivitas pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan kinerja, serta memastikan bahwa setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh dasar yang lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 5.3
Perbandingan Kinerja OPD s.d Bulan September Tahun 2026 dengan Tahun 2025

RANK	PERANGKAT DAERAH	TA 2025 (%)	TA 2026 (%)	(+/-) %
1	Dinas Sosial	46,92	76,51	29,58
2	Rumah Sakit Umum Daerah	66,46	88,31	21,85
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40,02	57,21	17,19
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63,11	78,25	15,14
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57,71	68,68	10,97
6	Sekretariat Daerah	55,72	63,93	8,22
7	Sekretariat DPRD	56,84	63,74	6,89
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48,84	55,40	6,57
9	Dinas Perhubungan	66,86	73,35	6,49
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59,94	66,36	6,42
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	63,30	66,48	3,18
12	Dinas Lingkungan Hidup	66,51	67,43	0,92
13	Kecamatan Gatak	66,26	67,13	0,87
14	Satuan Polisi Pamong Praja	64,14	64,59	0,45
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	63,21	62,72	-0,49
16	Dinas Kesehatan	65,33	64,83	-0,51
17	Inspektorat Daerah	56,55	55,69	-0,85
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53,76	52,23	-1,53
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	64,03	61,85	-2,18
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,04	70,19	-2,84
21	Kecamatan Bendosari	61,43	57,81	-3,62
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	59,07	54,14	-4,93
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	62,75	57,31	-5,44
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	55,11	48,73	-6,37
25	Kecamatan Mojolaban	62,22	55,70	-6,51
26	Dinas Pangan	61,71	54,70	-7,01
27	Kecamatan Kartasura	60,43	51,97	-8,47
28	Kecamatan Polokarto	66,41	55,94	-10,47
29	Kecamatan Grogol	70,27	59,47	-10,80
30	Kecamatan Nguter	68,22	55,80	-12,41
31	Kecamatan Bulu	64,76	52,30	-12,46
32	Kecamatan Sukoharjo	62,37	49,28	-13,10
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	66,48	52,09	-14,39
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63,10	48,63	-14,48
35	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73,76	58,98	-14,79
36	Kecamatan Weru	67,36	52,42	-14,94
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,97	35,71	-15,26
38	Kecamatan Tawang Sari	69,21	51,50	-17,72
39	Kecamatan Baki	73,15	55,20	-17,95
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	68,76	49,96	-18,80
	JUMLAH	63,90	66,38	2,48

Sumber : Data diolah

Rekapitulasi perbandingan belanja masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan September 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025 secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

A. RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar Rp. 2.781.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Daftar Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026
Setelah Perubahan

No.	Nama Kegiatan	OPD Pengampu	Pagu (Rp.)
1.	TMMD	DPMD	921.000.000
2.	Pengaspalan Jalan Hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo	DPKP	540.000.000
3.	Pembangunan Rabat Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	DPKP	970.000.000
4.	Pembangunan Talud Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	DPKP	350.000.000
JUMLAH			2.781.000.000

B. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI

Adapun perkembangan dari kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Setelah Perubahan sampai dengan Bulan September 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Penginputan RKO (Rencana Kerja Operasional) pada Aplikasi SIVERO
 - a. RKO untuk kegiatan TMMD yang diampu oleh DPMD sudah diinput dan sudah diverifikasi.
 - b. RKO untuk kegiatan yang diampu oleh DPKP sudah diinput pada Aplikasi SIVERO dan sedang proses verifikasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan APBD Provinsi
Capaian realisasi fisik dan keuangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Sukoharjo APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sampai
dengan bulan September 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.2

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2026 s.d September 2026

APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 s.d September 2020					
KEGIATAN	APBD PROVINSI	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
			KEUANGAN	% DARI KONTRAK/ SWAKELOLA	
DPMD					
Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	921.000.000	921.000.000	676.000.000	73,40	75
DPKP					
Pengaspalan Jalan Hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo	540.000.000	0	0	0	0
Pembangunan Rabat Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	970.000.000	0	0	0	0
Pembangunan Talud Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	350.000.000	0	0	0	0
TOTAL	2.781.000.000	921.000.000	676.000.000	18,35	18,75

Sumber : Data diolah

Adapun rekapitulasi progres pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan
APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 sampai bulan September 2026 secara
lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VII

PROYEK STRATEGIS

Proyek Strategis untuk Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 000.7.6/125 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026.

Adapun perkembangan 10 (sepuluh) proyek strategis per 13 Oktober 2026 sebagai berikut :

1. Pembangunan Masjid Kartasura (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 25.000.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 21.005.740.000,00
Nama Penyedia	: PT Usaha Gedung Mandiri
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 220 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 20 Mei – 25 Desember 2026
Target Fisik	: 35,94%
Realisasi Fisik	: 48,83%
Deviasi	: 12,89%
Realisasi Keuangan	: Rp. 4.201.148.000,00
2. Peningkatan Jalan Tanjunganom - Daleman (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 19.200.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 17.666.777.305,00
Nama Penyedia	: PT Jaya Sempurna Sakti
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 225 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 8 Juni – 4 Desember 2026
Target Fisik	: 97,10%
Realisasi Fisik	: 99,90%
Deviasi	: 2,80%
Realisasi Keuangan	: Rp. 10.600.066.383,00
3. Peningkatan Jalan Adi Sumarmo (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 8.000.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 6.124.838.000,00
Nama Penyedia	: CV Anugerah Lima Utama
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 8 Juni – 4 Desember 2026
Target Fisik	: 75,239%
Realisasi Fisik	: 95,869%

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| | Deviasi | : 20,630% |
| | Realisasi Keuangan | : Rp. 3.981.144.700,00 |
| 4. | Pemeliharaan Pasar Kartasura (DISKOPUMDAG) | |
| | Pagu Anggaran | : Rp. 7.000.000.000,00 |
| | Sumber Dana | : APBD |
| | Nilai Kontrak | : Rp. 5.405.000.000,00 |
| | Nama Penyedia | : PT Karya Mekar Konstruksi |
| | Jangka Waktu Pelaksanaan | : 180 Hari Kalender |
| | Waktu Pelaksanaan | : 2 Juni – 28 November 2026 |
| | Target Fisik | : 39,48% |
| | Realisasi Fisik | : 44,52% |
| | Deviasi | : 5,04% |
| | Realisasi Keuangan | : Rp. 1.621.500.000,00 |
| 5. | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten (DISHUB) | |
| | Pagu Anggaran | : Rp. 4.156.500.000,00 |
| | Sumber Dana | : APBD |
| | Nilai Kontrak | : Rp. 3.660.451.551,00 |
| | Nama Penyedia | : CV Sinar Abadi Jaya |
| | Jangka Waktu Pelaksanaan | : 90 Hari Kalender |
| | Waktu Pelaksanaan | : 9 Januari – 8 Mei 2026 |
| | Target Fisik | : 100% |
| | Realisasi Fisik | : 100% |
| | Realisasi Keuangan | : Rp. 3.660.451.551,00 |
| | Tanggal PHO | : 5 Mei 2026 |
| 6. | Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo (DISKOPUMDAG) | |
| | Pagu Anggaran | : Rp.3.775.900.000,00 |
| | Sumber Dana | : APBD |
| | Nilai Kontrak | : Rp. 2.922.539.000,00 |
| | Nama Penyedia | : CV Bandung Bondowoso |
| | Jangka Waktu Pelaksanaan | : 180 Hari Kalender |
| | Waktu Pelaksanaan | : 22 Juni – 18 Desember 2026 |
| | Target Fisik | : 57,16% |
| | Realisasi Fisik | : 71,98% |
| | Deviasi | : 14,82% |
| | Realisasi Keuangan | : Rp. 876.761.700,00 |
| 7. | Peningkatan Jalan Tawangsari-Pojok (DPUPR) | |
| | Pagu Anggaran | : Rp. 2.500.000.000,00 |
| | Sumber Dana | : APBD |
| | Nilai Kontrak | : Rp. 1.996.344.000,00 |
| | Nama Penyedia | : CV Banyu Mili |
| | Jangka Waktu Pelaksanaan | : 180 Hari Kalender |
| | Waktu Pelaksanaan | : 08 Juni – 4 Desember 2026 |

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Target Fisik | : 100% |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 598.903.200,00 |
| Tanggal PHO | : 13 Oktober 2026 |
8. Peningkatan Jalan Ambil-Ambil Tanjung (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Pagu Anggaran | : Rp. 2.000.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Nilai Kontrak | : Rp. 1.975.760.000,00 |
| Nama Penyedia | : CV Rorin Berdikari |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 90 Hari Kalender |
| Waktu Pelaksanaan | : 8 Juni – 4 Desember 2026 |
| Target Fisik | : 100% |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 1.975.760.000,00 |
| Tanggal PHO | : 03 Agustus 2026 |
9. Rehabilitasi Jembatan Sayegan (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Pagu Anggaran | : Rp. 1.950.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Nilai Kontrak | : Rp. 1.490.892.000,00 |
| Nama Penyedia | : CV. Tunggal Tri Perkasa |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 155 Hari Kalender |
| Target Fisik | : 58,78% |
| Realisasi Fisik | : 55,87% |
| Deviasi | : -2,91% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 447.267.600,00 |
10. Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang–Mojo (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Pagu Anggaran | : Rp. 1.800.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Nilai Kontrak | : Rp. 1.275.835.000,00 |
| Nama Penyedia | : CV. Panjawi |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 95 Hari Kalender |
| Target Fisik | : 40,384% |
| Realisasi Fisik | : 27,679% |
| Deviasi | : -12,705% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 0,00 |

Adapun rekapitulasi progres pelaksanaan kegiatan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2026 per 13 Oktober 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran V yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Sampai dengan 8 Oktober 2026, pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Jumlah Paket Pekerjaan Infrastruktur	:	288 paket
Sudah Input Laporan	:	288 paket (100%)
Belum Input Laporan	:	0 paket (0%)
Belum Proses Pengadaan	:	81 paket (28,13%)
Sedang Proses Pengadaan	:	101 paket (35,07%)
Selesai Proses Pengadaan	:	106 paket (36,80%)
Progress Fisik	:	50,87%

Tabel 8.1

Perkembangan Kegiatan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 s.d 8 Oktober 2026

No	Nama OPD	Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi (RUP)	Proses Pemilihan Penyedia			Progres Fisik (%)
			Belum Proses	Sedang Proses	Selesai Proses	
1	Dinas Kesehatan	1	0	0	1	100,00%
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	8	0	0	8	88,10%
3	Dinas Lingkungan Hidup	11	0	2	9	81,82%
4	Dinas Perhubungan	9	2	0	7	77,78%
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	21	0	5	16	70,24%
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1	0	0	1	54,30%
7	Sekretariat DPRD	17	6	4	7	41,18%
8	Sekretariat Daerah	3	2	0	1	33,33%
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84	0	54	30	23,92%
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	92	70	0	22	23,91%
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18	0	16	2	11,11%
12	Kecamatan Sukoharjo	21	1	18	2	4,76%
13	Kecamatan Kartasura	2	0	2	0	0,00%
	TOTAL	288	81	101	106	50,87%

Sumber : Data diolah

BAB IX PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026 adalah sebesar Rp. 1.338.473.224.836,00 (66,38%).
2. Untuk kegiatan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo, kegiatan TMMD yang diampu DPMD telah mencapai realisasi keuangan sebesar Rp. 676.000.000,00 atau 73,40% dari nilai kontrak/swakelola, dengan realisasi fisik sebesar 75%, sedangkan tiga kegiatan yang diampu DPKP masih dalam proses verifikasi RKO.
3. Dari total 10 proyek strategis, sebanyak 8 proyek telah menunjukkan realisasi fisik yang melampaui target, termasuk 3 proyek yang telah selesai 100%. Sementara itu, 2 proyek lainnya, yaitu Rehabilitasi Jembatan Sayegan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang–Mojo, masih mengalami deviasi negatif masing-masing sebesar 2,91% dan 12,705%, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian yang lebih intensif.
4. Dari total 288 paket pekerjaan infrastruktur, 106 paket pekerjaan sudah selesai proses pengadaannya, dengan realisasi fisik mencapai 50,87%.

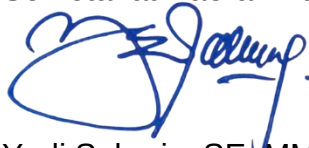
B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD pada Triwulan IV, setiap perangkat daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempercepat penyelesaian pekerjaan yang masih berlangsung serta menindaklanjuti berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat pencapaian target. Perangkat daerah juga perlu memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta memastikan kesesuaian antara progres fisik, realisasi keuangan, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah percepatan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan dengan tingkat realisasi yang belum optimal, sehingga sisa waktu pelaksanaan anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD pada Triwulan IV, mengoptimalkan pencapaian target program dan kegiatan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Demikian gambaran singkat tentang kinerja kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 yang sudah berjalan sampai dengan bulan September 2026 sebagai bagian dari proses manajerial, serta bahan evaluasi terhadap kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sukoharjo, Oktober 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo



Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina

NIP 197603102011011006